

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN (STUDI PADA KELURAHAN NGAGLIK KECAMATAN BATU KOTA BATU)

Evaluation of Community and Economic Empowerment Policies (Study on Ngaglik Village Batu Sub-District Batu City)

Salvinus Serafim Jemalu^{1*}
Roro Merry Chornelia
Wulandary¹
Annisa Purwatiningsih¹

¹Universitas Tribhuwana Tunggaladewi,
Malang

*corresponding author:
pepinjemalu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Fokus utama adalah menilai efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Responden mencakup warga kelurahan, perangkat kelurahan, dan kepala seksi (Kasi) bidang pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan keterampilan dan produktivitas warga, meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan anggaran. Kebijakan ekonomi juga berkontribusi terhadap pengembangan sektor ekonomi lokal, namun tantangan dalam akses modal dan jaringan pasar masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal serta menciptakan peluang yang lebih inklusif bagi masyarakat.

Kata Kunci:

Evaluasi kebijakan
Efektivitas
Pemberdayaan masyarakat
Perekonomian lokal

Keywords:

Policy evaluation
Effectiveness
Community empowerment
Local economy

Abstract

This study evaluates community empowerment and economic policies in Ngaglik Village, Batu District, Batu City. The main focus is to assess the effectiveness of the policy in improving community welfare and local economic growth. The method used is qualitative with in-depth interviews, field observations, and document analysis. Respondents include village residents, village officials, and the head of the empowerment section (Kasi). The results of the study indicate that the community empowerment policy has succeeded in improving the skills and productivity of residents, although there are still obstacles such as lack of community understanding and budget constraints. Economic policies also contribute to the development of the local economic sector, but challenges in accessing capital and market networks are still obstacles. Therefore, increased cooperation is needed between the government, community, and private sector to strengthen local economic capacity and create more inclusive opportunities for the community.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment>

Submit: 11-04-2025

Accepted: 20-04-2025

Published: 25-04-2025

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-undang ini mengatur mengenai desentralisasi pemerintahan, termasuk kewenangan kelurahan dalam pengelolaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kelurahan sebagai bagian dari pemerintahan daerah memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kelurahan Ngaglik, diharapkan dapat

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pemberdayaan yang diterapkan, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mempengaruhi masyarakat dan perekonomian di tingkat kelurahan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan yang lebih efektif

dan efisien. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan masyarakat, kebijakan pemberdayaan harus mampu beradaptasi dan menjawab tantangan yang ada.

Di Kelurahan Ngaglik, dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah memerlukan langkah strategi yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap penerapan dan dampak kebijakan yang ada menjadi sangat penting. Kebijakan yang diterapkan di Kelurahan Ngaglik dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat serta mengevaluasi keberhasilannya dalam menciptakan perubahan yang positif. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan, sehingga pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi di wilayah tersebut dapat terus ditingkatkan secara efektif dalam pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan perekonomian lokal.

Di Indonesia, berbagai kebijakan telah dicanangkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama di tingkat kelurahan, yang merupakan unit administrasi terkecil dan terdekat dengan warga. Salah satu kelurahan yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah Kelurahan Ngaglik, Kota Batu. Evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian merupakan langkah strategis untuk menilai dampak dan efektivitas program-program yang telah diimplementasikan. Melalui evaluasi ini, dapat diidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan potensi perbaikan guna memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kesejahteraan

warga setempat. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi keberhasilan, kendala, serta peluang perbaikan untuk optimalisasi kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang program-program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat di Kelurahan Ngaglik secara efektif.

Pemerintah Kelurahan telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Banyak program yang berjalan, tetapi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kurang berdampak secara jangka panjang. Sosialisasi yang kurang efektif, keterbatasan akses terhadap informasi, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat jangka panjang dari program-program ini menjadi penyebab rendahnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai inisiatif ekonomi yang disediakan. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang ada, termasuk aspek-aspek seperti partisipasi masyarakat, dukungan sumberdaya, dan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, hasil dari evaluasi ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan di Kelurahan Ngaglik, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan dan perekonomian, serta menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan (M. Rifai Hasibuan 2020).

Peneliti pada penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang *integrated perspective*) yaitu pertama, perspektif analitis pencapaian kebijakan program yang diimplementasikan dengan alat ukur yang digunakan

untuk menilai kinerja kebijakan (Theodoulou dan Kofinis, 2004). Kedua, perspektif utilization-focused evaluation yaitu evaluasi yang dilakukan dengan tujuan agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pengguna utama yaitu pembuat kebijakan, pemangku kepentingan program dan pelaksana program (Michael Quinn Patton, 2008). Evaluasi kebijakan meliputi indikator data yang mencerminkan pencapaian tujuan kebijakan dan indikator proses yang mengukur kegiatan yang direncanakan dalam kebijakan yang diimplementasikan mencakup langkah yang diambil dan aktivitas yang dilakukan dalam kerangka pencapaian hasil kebijakan (Patton M.Q, 2008). Keberhasilan di evaluasi dengan menggunakan kriteria efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan (William Dunn, dalam Subarsono, 2011).

Sedangkan teori pemberdayaan masyarakat pada penelitian ini mendasari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2020) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses individu dan kelompok memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuannya mengatasi masalah dan pengambilan keputusan. Sesuai dengan tujuan Ife, Jim & Tesoriero, Frank (2016) bahwa pemberdayaan masyarakat untuk masa depan masyarakat sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan kelompoknya.

Selanjutnya evaluasi kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian masyarakat, peneliti menggunakan beberapa indikasi yaitu pertama, memiliki kemampuan akses fasilitas, memiliki kemampuan membeli komoditas, memiliki kemampuan mengambil keputusan dan memiliki kesadaran hukum dan politik (Fauzan dan Ramdani, 2018). Pada evaluasi kebijakan diperlukan peran pemerintah pada kebijakan adalah penyediaan informasi dan pendidikan, fasilitas kegiatan ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

dan perencanaan pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan untuk membentuk dan menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta kemandirian ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat (Juhari, Teuku Zulyad, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Ngaglik untuk menganalisa peningkatan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan model interaktif yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling, dengan informan yang terdiri dari Lurah, Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan dan Perekonomian, Staff Pelayanan dan Masyarakat setempat. Keabsahan data diuji dengan triangulasi yaitu teknik untuk memastikan kredibilitas data yang diperoleh. Peneliti sebagai instrumen utama bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Akses Fasilitas

Pemerintah kelurahan sudah menyediakan fasilitas untuk meningkatkan pemberdayaan Masyarakat. Meskipun pemerintah kelurahan telah menyediakan fasilitas untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh warga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi dan partisipasi aktif dari masyarakat. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah tambahan agar masyarakat lebih terlibat dalam memanfaatkan fasilitas tersebut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Pemerintah kelurahan Ngaglik juga sudah menyediakan fasilitas-fasilitas

seperti ketersediaan perpustakaan untuk menunjang minat baca bagi para pelajar, dan lewat pelayanan posyandu yang dilakukan oleh ibu-ibu Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Namun karena keterbatasan informasi untuk masyarakat dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Kota Batu. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan komunikasi dan penyuluhan agar masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan.



Gambar 1. Perpustakaan sebagai Fasilitas Kelurahan dan layanan Posyandu dilakukan oleh PKK Kelurahan Ngaglik
Sumber :data sekunder 2024

Fasilitas yang disediakan Pemerintah Kelurahan Ngaglik telah dilengkapi untuk pemberdayaan masyarakat,

aksesibilitas dan pemanfaatannya masih terbatas akibat kurangnya informasi yang jelas dan keterbatasan jam operasional menjadi terbatasnya masyarakat menggunakan fasilitas tersebut, sehingga dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Fauzan dan Ramdani (2018) bahwa memiliki kemampuan akses fasilitas dalam pemberdayaan masyarakat berarti kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses memanfaatkan berbagi layanan dan sumber daya yang ada di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas tersebut bisa meliputi layanan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelatihan keterampilan dan sumberdaya lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat.

Memiliki Kemampuan Membeli Komoditas

Kemampuan membeli barang atau produk hasil olahan masyarakat di Kelurahan Ngaglik sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kelurahan secara rutin mengadakan pelatihan yang difokuskan pada usaha kecil, seperti pelatihan pengolahan hasil tani menjadi produk bernilai tambah. Program pelatihan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang baik dengan memberikan keterampilan tambahan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun, meskipun program pelatihan ini berjalan dengan baik, tantangan seperti keterbatasan akses pasar dan kurangnya pemahaman mengenai strategi pemasaran masih menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi usaha masyarakat.

Kemampuan membeli komoditas masyarakat di Kelurahan Ngaglik mengalami kemajuan signifikan terutama dalam usaha dari home industri lidah buaya yang ada di RT 12 Kelurahan Ngaglik dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, yang didorong oleh program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada usaha kecil

dan pelatihan keterampilan. Dengan penghasilan yang memadai, masyarakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat mengembangkan usaha serta merencanakan masa depan secara lebih mandiri. Peningkatan daya beli turut memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan partisipasi dalam berbagai kegiatan kelurahan, serta menciptakan lingkungan yang saling mendukung untuk memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Program pemberdayaan yang ada terbukti berhasil dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.



Gambar 2. Hasil Olahan Dari Home Industri Lidah Buaya Masyarakat RT 12 Kelurahan Ngaglik
Sumber: Data Sekunder 2024

Hasil penelitian ini sependapat dengan Jack Rothman (dalam Edi Suharto, 2014) bahwa program pemberdayaan masyarakat berbentuk pengembangan lokal yang mengedepankan proses menggerakkan potensi yang ada di masyarakat sebagai model pengentasan ketidakberdayaan masyarakat. Di Kelurahan Ngaglik masyarakat diposisikan sebagai dinamisor yang bersifat profesional. Para penggerak terdiri dari mereka yang memiliki keterampilan terlatih dalam merencanakan aksi pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat usaha kecil menengah.

Memiliki Kemampuan Mengambil Keputusan

Kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Ngaglik dalam membuat keputusan lewat kegiatan

Musrenbang merupakan hal penting dalam pemberdayaan masyarakat bagi kelurahan ini. Masyarakat Kelurahan Ngaglik yang terampil dalam mengambil keputusan lebih aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi, serta mampu memilih solusi terbaik untuk kesejahteraan bersama. Pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang memperkuat kapasitas mereka untuk mengelola pembangunan dan sumberdaya secara mandiri. Kemampuan masyarakat dalam membuat keputusan merupakan aspek yang krusial dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan cenderung lebih terlibat dalam aktivitas sosial dan ekonomi, serta dapat menentukan solusi terbaik untuk kesejahteraan bersama. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak individu dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola pembangunan perekonomian dan sumberdaya secara mandiri.



Gambar 3. Sosialisasi dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan Ngaglik
Sumber: Data Sekunder 2024

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan dan perekonomian masyarakat kelurahan Ngaglik sangat antusias untuk berpartisipasi pada kegiatan yang diadakan pihak kelurahan Ngaglik. Hal ini tercermin dari tingkat kehadirannya dalam musyawarah dan pertemuan yang diadakan Kelurahan Ngaglik, serta aktifnya warga dalam memberikan ide dan solusi. Partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Ngaglik merasa

diberdayakan dan memiliki tanggungjawab terhadap kemajuan lingkungan.

Memiliki Kesadaran Hukum dan Politik

Kesadaran hukum dan politik masyarakat Ngaglik terkait pemberdayaan telah berkembang dengan baik melalui proses partisipatif yang melibatkan mereka dalam setiap tahap perencanaan pembangunan dan perekonomian. Masyarakat kelurahan Ngaglik tidak hanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan, tetapi juga dilibatkan dalam pengawasan serta pelaksanaan program-program tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam forum seperti Musrenbang dan sosialisasi rutin di tingkat RT/RW menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran yang kuat akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta memahami pentingnya kontribusi mereka dalam menjalankan kehidupan demokratis di tingkat kelurahan. Hal ini sudah terbangun dengan baik melalui proses partisipatif masyarakat, tidak hanya diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan masukan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dan perekonomian, tetapi juga diajak untuk memahami pentingnya peran serta mereka dalam pengawasan dan pelaksanaan program-program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam forum seperti Musrenbang, serta sosialisasi yang rutin dilakukan di tingkat RT/RW, menunjukkan adanya kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.



Gambar 4. Forum Masyarakat Kelurahan Ngaglik Tentang Kebijakan Pemerintah Kelurahan Ngaglik
Sumber: Data Sekunder 2024

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Evaluasi Kebijakan

Faktor pendukung, ketersediaan fasilitas yang disediakan pemerintah kelurahan Ngaglik telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung pemberdayaan, seperti posyandu untuk kesehatan, perpustakaan untuk pendidikan dan hasil olahan yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti home Industri lidah buaya yang di RW 12 kelurahan Ngaglik. Komunikasi dan sosialisasi yang berkelanjutan Pemerintah Kelurahan Ngaglik terus berusaha meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Melalui forum musrenbang serta sosialisasi yang rutin, diharapkan warga dapat memahami dan lebih aktif terlibat dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan, meskipun masih ada tantangan terkait penyebaran informasi yang belum diterima dengan baik oleh seluruh warga.

Faktor penghambat, kurangnya pemahaman masyarakat akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kelurahan adalah bahwa masyarakat tidak sepenuhnya mengerti atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kebijakan pemberdayaan dan perekonomian yang diterapkan oleh pemerintah kelurahan. Sebagai solusi Pemerintah Kelurahan Ngaglik sebaiknya terus meningkatkan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan rutin, papan pengumuman. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan melalui forum atau musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Ngaglik. Hal ini sesuai pendapat Rossi, Lipsey dan Henry (2019) bahwa efektivitas, efisiensi dan relevansi kebijakan akan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan. Sehingga keterlibatan masyarakat berdampak positif pada keberhasilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Keterbatasan anggaran yang tersedia adalah salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan perekonomian di kelurahan Ngaglik.. Meskipun banyak program baik yang direncanakan,

keterbatasan dana membuat pemerintah kelurahan harus memilih program-program yang lebih mendesak, sehingga mengurangi cakupan kegiatan yang biasa dilaksanakan. Solusi dari keterbatasan anggaran Pemerintah Kelurahan Ngaglik sebaiknya menetapkan prioritas anggaran dengan fokus pada program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat seperti mengadakan pelatihan keterampilan dan pendampingan bagi kelompok usaha mikro dan kecil (UMKM) di Kelurahan Ngaglik. Serta memaksimalkan potensi dari home industry yang di kerjakan oleh ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta mengurangi kegiatan yang kurang mendesak. Seperti pertunjukan seni atau festival budaya yang tidak mendesak.

Faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat, meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses, masih terdapat segmen warga yang kurang tertarik atau tidak terlibat aktif. Beberapa masyarakat merasa tidak memiliki peran dalam pembangunan atau merasa kurang terinformasi, terutama warga yang tinggal di daerah yang lebih jauh dari pusat kelurahan Ngaglik. Solusi dari kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat, Pemerintah Kelurahan Ngaglik diharapkan terus meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperbaiki komunikasi dan melakukan penyuluhan kepada warga. Pemerintah Kelurahan Ngaglik dapat mengadakan pertemuan rutin di tingkat RT atau RW, di mana semua warga diundang untuk datang dan berdiskusi mengenai isu-isu terkini yang ada di kelurahan. Sesuai pendapat Roshanti (2022) bahwa kebijakan yang dikembangkan adalah untuk memecahkan masalah publik yang disepakati dalam agenda pemerintah dan diakhiri beberapa alternatif yang dianggap tepat.

KESIMPULAN

Hasil evaluasi terkait dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kelurahan Ngaglik belum

sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, dikarenakan pemahaman masyarakat terkait dengan kebijakan yang dibuat pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan Ngaglik menyediakan fasilitas untuk menunjang program pemberdayaan seperti fasilitas kesehatan (posyandu), pendidikan (perpustakaan) guna meningkatkan minat baca, home industry lidah buaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang memiliki kemampuan membeli barang dan jasa yang dibutuhkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki kesempatan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Peningkatan daya beli ini juga mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan warga Ngaglik dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) memungkinkan mereka untuk menyuarakan pendapat dan menentukan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program-program pembangunan dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. upaya pemerintah kelurahan melalui sosialisasi dan pelatihan telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya dalam memahami konsep kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kelurahan Ngaglik. Faktor penghambat dan pendukung evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu. Faktor utama yang menghambat adalah kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat akan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kelurahan Ngaglik. Adapun faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat yang aktif, komunikasi dan sosialisasi, ketersediaan fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Pemerintah Kelurahan Ngaglik telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung pemberdayaan, seperti posyandu untuk kesehatan, perpustakaan untuk pendidikan, serta

layanan lainnya yang mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.

REFERENSI

- Afriansyah, A., Afdhal, A., Mustanir, A., et al. 2023. *Pemberdayaan Masyarakat*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Farihul A. 2024. *Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semolowaru Melalui Perpustakaan, Semolowaru..Surabaya*. (<https://repository.unair.ac.id/68423/3/Fis.IIP.101.17%20.%20Asy.p%20-%20JURNAL.pdf> , Diakses Pada 12 November 2024)
- Husnul, M. 2018. *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Rindingallo, Kec. Rongkong, Kab. Luwu Utara*. Palopo (http://repository.umpalopo.ac.id/2885/1/JURNAL%20MIFTAH%20HUSNUL_201810068.pdf), Diakses pada tanggal 5 November 2024
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2020 *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (<https://www.kemendes.go.id/> ,di akses pada 31 Oktober 2024)
- Kretisana J. 2024 *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang*, ([file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2362-Article%20Text-9449-1-10-20240605%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2362-Article%20Text-9449-1-10-20240605%20(1).pdf)), Diakses pada 12 November 2024
- Miles, M.B. Huberman, A.M, Saldana.J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Ed3. London, Sage Publications.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad B. 2019. *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Desa Batuma Bondro Biringbulu Di Kabupaten Gowa*. ([file:///C:/Users/Administrator/Downloads/3584-11048-3-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/3584-11048-3-PB%20(1).pdf), Diakses pada 12 November 2024)
- Paiton, M.Q (2008). *Utilization Focused Evaluation*. Thousand Oaks, CA. Sage Publication.
- Penerbitan Sosial Indonesia. 2019. *Ketercapaian indikator keberdayaan masyarakat dalam program pemberdayaan fakir miskin* (<https://media.neliti.com/media/publications/9246-ID-ketercapaian-indikator-keberdayaan-masyarakat-dalam-program-pemberdayaan-fakir-m.pdf>, Diakses pada 23 Oktober 2024)
- Rofiyanto, Y., & Yakobus, E. 2023. *Proses Perumusan Kebijakan Publik di DPRD Kabupaten Mappi* (<https://www.ejournal.unmus.ac.id/>, Diakses pada

23 Oktober 2024)

- Sejati, V. A. 2019. *Penelitian Observasi Partisipatif Bentuk Komunikasi Interkultural Pelajar Internasional Embassy English Brighton, United Kingdom*. (<https://doi.org/10.33319/sos.v20i1.33>, Diakses pada 26 Oktober 2024)
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta